

# Pengaruh Dewan Terkoneksi Politik terhadap Tingkat Simpanan, Tingkat Kredit dan Risiko Kredit Perbankan di Indonesia

Chyntia Meiliana Putri<sup>1</sup>, Supatmi Supatmi<sup>2</sup>

<sup>12</sup>Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga, Indonesia

---

---

## ABSTRACT

---

### Keywords:

Board;  
Political;  
Deposit rate;  
Credit rate;  
Credit risk;  
Banking.

**Abstract:** The banking industry in Indonesia is growing and has a good effect on the progress of the country. The important things that can increase bank income, such as bank savings, credit, and credit risk that need to be taken into account. External environmental factors, such as the political environment, also affect the bank's progress. Therefore, this study aims to determine how politically connected boards influence credit levels, deposit rates, and credit risk in Indonesian banks. The population in this study was 44 banks on the IDX in 2017-2019. The sample selection in this study used purposive sampling and obtained 41 banks. This study uses regression analysis techniques of panel data, and it is processed using Eviews 10. The results show that the politically connected board of commissioners does not affect the level of savings, credit levels, and bank credit risk levels. Meanwhile, politically connected boards of directors were found to have a positive effect on credit levels. Besides, it has negative effects on credit risk, yet was found to have not affected the deposit rates.

---

### Kata kunci:

Dewan;  
Politik;  
Tingkat simpanan;  
Tingkat kredit;  
Risiko kredit;  
Perbankan.

**Abstrak:** Industri perbankan di Indonesia semakin berkembang dan berpengaruh baik pada kemajuan negara. Hal-hal penting yang dapat meningkatkan pendapatan bank, diantaranya simpanan bank, pengkreditan, dan risiko kredit yang perlu diperhitungkan. Faktor lingkungan eksternal, seperti lingkungan politik juga berpengaruh terhadap kemajuan bank. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh dewan terkoneksi politik terhadap tingkat kredit, tingkat simpanan dan risiko kredit di perbankan Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah 44 perbankan di BEI pada tahun 2017-2019. Pemilihan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan diperoleh 41 perbankan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel dan diolah menggunakan *eviews 10*. Hasil penelitian menunjukkan dewan komisaris terkoneksi politik tidak berpengaruh terhadap tingkat simpanan, tingkat kredit maupun tingkat risiko kredit perbankan. Sementara itu, dewan direksi terkoneksi politik ditemukan berpengaruh positif terhadap tingkat kredit dan berpengaruh negatif terhadap risiko kredit namun ditemukan tidak berpengaruh terhadap tingkat simpanan.

---

### Alamat Korespondensi:

E-mail: meilianaputrichyntia@gmail.com (Chyntia)

---

## Pendahuluan

Industri perbankan di Indonesia semakin berkembang dan memberikan pengaruh yang baik untuk membantu kemajuan negara. Kinerja bank dapat dilihat dari beberapa indikator, seperti *Non*

*Performing Loan* (NPL), *Loan to Deposit Rasio* (LDR), *Times Interest Ratio* (TIR) atau sering disebut *Interest Coverage Rasio* (ICR), dan suku bunga kredit (Astuti, 2016). NPL yang tinggi merupakan tanda gagalannya bank dalam mengelola bisnis, mengenai masalah likuiditas, rentabilitas, dan *solvabilitas*. NPL yang tinggi juga berdampak pada risiko kredit yang semakin besar, yang nantinya ditanggung oleh pihak bank. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (2020) selama 5 tahun terakhir, NPL rata-rata mengalami peningkatan, NPL masih dikatakan terkendali karena tidak mencapai batas tertinggi yang ditetapkan OJK, yaitu 5%. Selain NPL, LDR merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk menilai likuiditas LDR mempunyai fungsi untuk mengukur besarnya likuiditas, dengan cara membandingkan besarnya kredit yang diberikan dengan dana yang didapatkan dari pihak ketiga. LDR yang tinggi dinilai semakin rendah kemampuan likuiditas bank. Hal ini disebabkan karena dana yang diperlukan untuk membayar kredit semakin tinggi (Afriyeni, 2018). Batas tertinggi yang ditetapkan Bank Indonesia adalah 110%, sementara tahun 2020 rasio LDR sebesar 92,36% yang artinya masih baik. Namun, pada Oktober 2019 terjadi penurunan suku bunga Bank Indonesia, yang diikuti penurunan bunga kredit bank. Bank Indonesia mencatat bahwa pertumbuhan kredit melambat, sehingga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dilakukan penurunan bunga kredit bank yang dapat meningkatkan permintaan kredit. Berkaitan dengan bunga, TIR berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melakukan transaksi pembayaran bunga dan hutang. Per Januari 2020 OJK mencatat TIR sebesar 0,46, yang berarti bank belum mampu membayar biaya bunga nya karena rasionya belum mencapai 1 (OJK., 2020).

Perbankan merupakan salah satu industri memiliki aturan dan pengawasan ketat (*highly regulated*) supaya tetap berjalan dengan kehati-hatian (*prudential*) (Harsanto, 2020; Sjojfan, 2015). Perbankan harus berusaha lebih keras untuk meningkatkan kinerjanya. Transaksi perbankan yang dapat memengaruhi kinerja bank seperti simpanan, kredit, dan risiko kredit yang harus diperhatikan. Faktor yang dapat memengaruhi kemajuan bank adalah faktor lingkungan, yang dinamakan lingkungan politik. Tee (2018) mengatakan bahwa keuntungan komersial yang tinggi dapat dicapai ketika pebisnis membina hubungan dekat dengan elit penguasa. Koneksi politik dapat memengaruhi transaksi dan kinerja bank. Dalam anggota dewan eksekutif maupun non eksekutif atau pemegang saham perusahaan adalah bagian dari pemerintah yang berkuasa, dari situ perusahaan akan memperoleh keuntungan fasilitas dalam melakukan transaksi dan memperoleh beberapa manfaat. Penelitian Faccio (2006) membuktikan bahwa perusahaan di Indonesia termasuk salah satu perusahaan terkoneksi politik paling tinggi. Sutopo *et al.* (2017) membuktikan koneksi politik meningkatkan kinerja bank (*return on assets* dan *return on equity*) di Indonesia tahun 2001-2008 dan ada kemungkinan bank untuk memiliki akses yang lebih besar ke dana. Lebih lanjut ditemukan bahwa bank yang terkoneksi politik mempunyai biaya pendanaan yang lebih rendah dari bank yang tidak terkoneksi politik dan lebih besar kemungkinan untuk mendapatkan bunga yang lebih kecil pada deposito karena dianggap kurang berisiko. Amalia & Muazaroh (2019) bank yang memiliki koneksi politik memungkinkan bank meningkatkan bunga pinjaman karena diharapkan memiliki kekuatan pasar lebih tinggi, Selain itu, bank terkoneksi politik juga dapat memperoleh kemudahan dalam pendanaan dan mendorong kinerjanya.

Studi yang meneliti dampak dari dewan terkoneksi politik terhadap pengambilan risiko bank tergolong masih sedikit. Penelitian Boateng *et al.* (2019) membuktikan dewan yang terkoneksi secara politik memberikan pengaruh negatif terhadap risiko kredit (NPL) pada perbankan di Tiongkok, terlebih bank milik negara. Supatmi *et al.* (2019) membuktikan bahwa interaksi koneksi politik dan transaksi pihak terkait di bank memengaruhi kemampuan bank, likuiditas, efisiensi, dan nilai pasarnya. Penelitian Tee (2018) menggunakan 750 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Malaysia menunjukkan bahwa perusahaan yang terkoneksi secara politik berhubungan negatif dengan biaya hutang. Didukung oleh pernyataan Ling *et al.* (2016) bahwa koneksi politik di perusahaan *real estate* Cina memiliki pengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa kemudahan akses pendanaan jangka panjang dapat berpengaruh buruk terhadap kinerja perusahaan karena menghasilkan investasi yang berlebihan.

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris pengaruh dewan terkoneksi politik terhadap tingkat kredit, tingkat simpanan dan risiko kredit di perbankan Indonesia. Pada penelitian ini mengambil sampel dari 44 bank di Indonesia yang terdaftar dalam BEI pada tahun 2017 – 2019.

Penelitian sebelumnya lebih banyak berfokus pada efek koneksi politik terhadap tingkat kredit dan risiko kredit. Penelitian ini akan menambahkan dampak koneksi politik terhadap tingkat simpanan dimana simpanan juga merupakan transaksi penting di perbankan yang diduga juga banyak dipengaruhi aspek politis. Koneksi politik dalam penelitian ini diukur dengan jumlah dewan yang terkoneksi politik dalam perusahaan, baik dewan komisaris maupun dewan direksi, bukan sekedar keberadaan koneksi politik dalam perusahaan. Dewan perusahaan (*board of director*) merupakan pihak yang terkait langsung dengan pengawasan dan pengelolaan perusahaan sehingga dewan yang terkoneksi politik akan berdampak langsung juga terhadap aktivitas perusahaan dan kinerjanya. Hasil penelitian dapat berkontribusi sebagai penambah bukti empiris mengenai aplikasi teori agensi di perbankan sebagai sektor *high regulated* di Indonesia. Industri perbankan yang terkoneksi politik akan mendapatkan hak khusus dalam kemudahan fasilitas dan peningkatan sumber daya (Sutopo *et al.*, 2017). Bagi perbankan, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memilih dan mengatur komposisi dewan direksi. Penelitian ini juga membantu investor untuk mempertimbangkan aspek koneksi politik dalam pengambilan keputusan investasi. Bagi OJK dan Bank Indonesia selaku pengambil kebijakan, hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan dalam mengatur ketentuan tata kelola perbankan, khususnya aspek komposisi dewan.

## Metode

Populasi dalam penelitian ini adalah 44 perbankan di BEI pada tahun 2017-2019 dan menggunakan *purposive sampling* (Hartono, 2013) dengan kriteria : menyediakan laporan tahunan 2017-2019, tanggal berakhirnya laporan keuangan adalah 31 Desember, terdapat informasi harga pasar saham pada akhir tahun, memiliki informasi mengenai profil dewan perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berisi laporan tahunan perusahaan perbankan, informasi profil dewan perusahaan, dan harga pasar saham perusahaan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif berupa angka. Data laporan keuangan diperoleh melalui [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan untuk mengetahui adanya koneksi politik dewan melalui situs terkait, sebagai contoh [www.dpr.go.id/anggota](http://www.dpr.go.id/anggota) dan [https://id.wikipedia.org/wiki/anggota DPR RI](https://id.wikipedia.org/wiki/anggota_DPR_RI), [http://id.wikipedia.org/wiki/menteri kabinet](http://id.wikipedia.org/wiki/menteri_kabinet), dan <http://www.kemendagri.go.id/staff-directory/gubernur-dan-wakil-gubernur> untuk gubernur beserta wakil gubernur.

Tingkat simpanan sebagai variabel dependen diukur dengan melihat jumlah simpanan dibagi dengan total aset yang tercantum dalam laporan tahunan. Lalu tingkat kredit diukur dengan jumlah kredit yang disalurkan dibagi dengan total liabilitas dalam laporan tahunan. Sedangkan, risiko kredit dapat diukur dengan rasio NPL yang mencakup kredit dengan kualitas kurang lancar dan berpotensi macet (Bank Indonesia, 2019). Data NPL diakses melalui website Bank Indonesia <http://www.bi.go.id>.

Dewan terkoneksi politik sebagai variabel independen dalam penelitian ini diukur dengan jumlah dewan perusahaan, baik dewan komisaris maupun direksi, yang memiliki koneksi politik (Supatmi, 2020). Penelitian ini menggunakan tiga variabel kontrol, yaitu ukuran perusahaan, *leverage*, kepemilikan manajerial. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan logaritma natural kapitalisasi pasar salam perusahaan diakhir tahun (Habib *et al.*, 2017). Ukuran perusahaan biasanya dapat dikaitkan dengan keamanan perusahaan, yang ditandai dengan banyaknya jasa keuangan yang ada (Akbar, 2013). Jasa simpanan dan kredit itu termasuk jasa yang ada diperbankan, lalu dari jasa kredit dapat muncul risiko kredit. Selanjutnya, tingkat *leverage* dihitung dengan cara membagi total kewajiban dengan total aset (Supatmi, 2020). Tingkat *leverage* yang kecil lebih disukai karena semakin besar tingkat *leverage* perbankan artinya banyak aset perbankan yang didanai dengan hutang (Rahmadani & Rahayu, 2017). Lalu, kepemilikan manajerial diukur dengan jumlah saham direksi, komisaris dan manajer dibagi jumlah saham beredar (Fadillah, 2017). Hal itu berarti saat perusahaan mengalami kenaikan laba maka harga saham juga mengalami kenaikan (Aluy *et al.*, 2017) dan dapat menarik minat pada nasabah untuk melakukan transaksi simpanan, transaksi kredit, dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap risiko kredit.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi data panel untuk pengujian hipotesisnya. Langkah-langkahnya sebagai berikut :

1. Statistik deskriptif digunakan untuk penjelasan penyebaran data, seperti: nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata, dan standar deviasi.
2. Pengujian asumsi klasik yang terdiri dari 4 jenis yaitu :
  1. Normalitas, Jarque-Bera. Data terdistribusi normal jika nilai  $p > 0,05$  (Winarno, 2015).
  2. Heterokedastisitas, uji Park. Data dikatakan tidak masalah jika nilai  $p > 0,05$  (Winarno, 2015).
  3. Autokorelasi, uji Durbin-Watson (DW). Nilai  $d$  yang berarti koefisien DW berada di antara 1,54 dan 2,46 berarti tidak ada masalah autokorelasi (Winarno, 2015).
  4. Multikolinearitas, hasil matrik korelasi antara variabel independen. Jika matrik korelasi antara variabel independen tidak ada yang  $> 80$ , artinya tidak ada multikolinearitas (Winarno, 2015).
3. Pengujian estimasi regresi data panel menggunakan 3 pengujian, antara lain:
  1. F Test (chow Test) : jika nilainya  $p > 0,05$  artinya model yang dipilih adalah CE, sebaliknya jika nilai  $p < 0,05$  artinya model yang dipilih adalah FE.
  2. Hausman Test : jika hasilnya  $p > 0,05$  artinya model RE yang dipilih, jika  $p < 0,05$  artinya model FE yang dipilih.
  3. Breusch dan Pagan Langrange Multiplier (LM) Test : untuk hasil pengujian yang tidak konsisten antara *fixed* dan *random* lakukan uji LM.

#### 4. Pengujian Hipotesis

Persamaan regresinya sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 DKP + \beta_2 DDP + \beta_3 UP + \beta_4 LV + \beta_5 KM + \varepsilon$$

Keterangan :

$Y$  : variabel dependen (tingkat simpanan, tingkat kredit, risiko kredit)

$\alpha$  : konstanta

$\beta_i$  : Koefisien regresi

$DKP$  : Dewan komisaris terkoneksi politik

$DDP$  : Dewan direksi terkoneksi politik

$UP$  : Ukuran perusahaan

$LV$  : *Leverage*

$KM$  : Kepemilikan manajerial

$\varepsilon$  : *Error*

Penerimaan hipotesis (H1 dan H2), menggunakan tingkat signifikansi 5 % dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 \geq 0 \quad H_a : \beta_1 < 0$$

Penerimaan hipotesis (H3), menggunakan tingkat signifikansi 5 % dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

$$H_0 : \beta_1 \leq 0 \quad H_a : \beta_1 > 0$$

## Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan 44 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2017 hingga 2019 sebagai polulasinya. Data laporan tahunan yang digunakan dapat diakses melalui website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) atau website perusahaan. Terdapat 41 perusahaan perbankan yang memenuhi kriteria sampel penelitian dari tahun 2017 sampai 2019 atau memiliki jumlah observasi 123 tahun perusahaan. Selama periode penelitian, terdapat 3 perusahaan perbankan yang tidak memenuhi kriteria sebagai sampel, yaitu 1 perusahaan perbankan melakukan merger dengan perusahaan lain, 1 perusahaan tidak menerbitkan laporan tahunan perusahaan secara lengkap dan ada 1 perusahaan yang baru melakukan *listing* saham. Hasil pengujian asumsi klasik ditemukan beberapa kendala dalam uji normalitas dan uji heterokedastisitas. Maka dari itu penelitian ini melakukan analisis data *outlier*, penghapusan titik-titik

ekstrim. Analisis data outlier dengan sampel kecil menggunakan Zscore > 2,5 atau < -2,5 dan untuk sampel besar dapat menggunakan nilai Zscore 4 atau lebih tergantung banyaknya sampel (Hair *et al.*, 2014). Pada penelitian ini data dikatakan *outlier* jika Zscore > 3 atau < -3. Ditemukan 11 data *outlier* pada penelitian ini, sehingga jumlah observasi menjadi 112 dan hasilnya data lolos masalah heterokedastisitas.

**Tabel 1.** Statistik Deskriptif

Variabel Penelitian	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Nilai Rata-rata	Standar Deviasi
TS	0,90	0,56	0,74	0,82
TK	0,97	0,39	0,76	0,11
RK	0,06	0,00	0,02	0,01
DKP	10,0	0,00	1,64	2,27
DDP	3,00	0,00	0,28	0,57
SIZE	34,35	26,03	29,65	1,89
LEV	1,00	0,61	0,84	0,06
KM	0,01	0,00	0,00	0,00

Keterangan:

TS: Tingkat Simpanan; TK: Tingkat Kredit; RK: Risiko Kredit; DKP: Dewan Komisaris terkoneksi Politik; DDP: Dewan Direksi terkoneksi Politik; SIZE: Ukuran perusahaan; LEV: *Leverage*; KM: Kepemilikan Manajerial Politik

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat nilai rata-rata tingkat simpanan (TS) sebesar 0,74 yang artinya dari keseluruhan total aset terdapat 0,74 total simpanan. Total simpanan ini berupa tabungan, deposito dan giro yang berasal dari nasabah, wajar jika aset didominasi simpanan karena usaha utama perbankan adalah menghimpun dana dan menyalurkan dana. Demikian pula nilai standar deviasi 0,08 menunjukkan besarnya rata-rata penyimpangan observasi data tingkat simpanan terhadap nilai rata-ratanya. Nilai standar deviasi yang tinggi menunjukkan kemampuan perusahaan mendapatkan simpanan dari aset yang ada di perusahaan sampel sangat bervariasi. Bank Yudha Bakti (BBYB) pada tahun 2019 memiliki kemampuan tertinggi dalam mendapatkan simpanan sebesar 0,90 sedangkan Bank Danamon (BDMN) memiliki kemampuan terendah sebesar 0,56.

Selanjutnya rata-rata tingkat kredit (TK) sebesar 0,76 yang artinya dari keseluruhan total hutang terdapat 0,76 total kredit didalamnya. Wajar jika hutang didominasi kredit, karena salah satu kegiatan usaha perbankan adalah memberikan kredit kepada nasabah, dengan begitu bank akan memperoleh keuntungan dari bunga yang dibebankan. Lalu, nilai standar deviasi 0,08 menunjukkan besarnya rata-rata penyimpangan observasi data tingkat kredit terhadap nilai rata-ratanya. Kemudian, nilai standar deviasi sebesar 0,11 menunjukkan kemampuan perusahaan memberikan kredit di perusahaan sampel memiliki variasi yang tinggi. Bank Panin Dubai Syariah (PNBS) tahun 2018 memiliki kemampuan tertinggi dalam memperoleh kredit sebesar 0,97, sedangkan Bank Jtrust (BCIC) tahun 2019 memiliki kemampuan terendah sebesar 0,39.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja perbankan baik, karena dilihat dari rata-rata risiko kredit (RK) sebesar 0,02, menurut Bank Indonesia (2004) dan OJK (2017) batas tertinggi NPL ditetapkan sebesar 0,05. Oleh karena itu, NPL di bawah 0,05 dikatakan perusahaan keuangan tidak memiliki masalah kredit macet. Risiko kredit diukur dengan rasio NPL, rata-rata risiko kredit yang rendah menandakan kredit non lancar rendah jika dibandingkan dengan total kredit. Nilai standar deviasi 0,01 menunjukkan bahwa rasio kredit yang bermasalah di perusahaan sampel memiliki variasi yang tinggi. Bank Bukopin (BBKP) tahun 2017 memiliki rasio kredit yang bermasalah tertinggi sebesar 0,064 sedangkan Bank Ganesha (BGTG) tahun 2019 memiliki rasio kredit yang bermasalah terendah sebesar 0,002.

Berhubungan dengan politik, dewan komisaris terkoneksi politik memiliki nilai rata-rata sebesar 1,64 atau setara dengan 2 orang. Lalu, nilai standar deviasi sebesar 2,27 menunjukkan besarnya

rata-rata penyimpangan observasi data dewan komisaris terkoneksi politik dengan rata-rata tidak terlalu jauh. Dewan komisaris dengan koneksi politik tertinggi yaitu Bank BRI (BBRI) sebanyak 10 dewan komisaris pada tahun 2018-2019. Selanjutnya, besarnya nilai rata-rata dewan direksi terkoneksi politik adalah 0,28 atau setara dengan 0, yang artinya sangat jarang yang memiliki dewan direksi terkoneksi politik, jika ada hanya 1 orang dewan direksi yang terkoneksi politik. Berdasarkan nilai rata-rata menunjukkan dewan komisaris terkoneksi politik lebih besar jumlahnya dari pada dewan direksi terkoneksi politik. Demikian pula, nilai standar deviasi sebesar 0,57 menunjukkan besarnya rata-rata penyimpangan observasi data dewan direksi terkoneksi politik dengan rata-rata tidak terlalu jauh. Dewan direksi dengan koneksi politik tertinggi yaitu Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (BJTM) sebesar 3 dewan direksi pada tahun 2017-2018.

*Size* pada sampel penelitian dihitung dengan logaritma natural kapitalisasi pasar yang menghasilkan rata-rata 29,65 dan nilai standar deviasi sebesar 1,89. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam ukuran perusahaan. Selain itu, tingkat *leverage* di perusahaan sampel memiliki rata-rata 0,84 dan standar deviasi sebesar 0,06. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar aset yang ada diperoleh dari pinjaman pihak ketiga. Selanjutnya, kepemilikan manajerial memiliki rata-rata sebesar 0,003 dan nilai standar deviasi sebesar 0,0014. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham dewan komisaris maupun dewan direksi dalam perbankan lebih rendah jika dibandingkan dengan saham beredar di pasar.

**Tabel 2.** Hasil Uji Asumsi Klasik

<b>Persamaan Regresi</b>	<b>Uji Normalitas (prob. Jarque-Bera)</b>	<b>Uji Heterokedastisitas (koefisien parameter untuk setiap variabel independen)</b>
TS	14,25359	semua tidak signifikan
TK	57,78638	semua tidak signifikan
RK	1,45037	sebagian signifikan

  

<b>Persamaan Regresi</b>	<b>Uji Autokorelasi (Durbin Watson stat)</b>	<b>Uji Mutikolinearitas (nilai korelasi antara variabel &gt; 0,8)</b>
TS	Tidak ada Autokorelasi	tidak ada
TK	Autokorelasi Negatif	tidak ada
RK	Autokorelasi Positif	tidak ada

Keterangan:

TS: Tingkat Simpanan; TK: Tingkat Kredit; RK: Risiko Kredit

Uji multikolinearitas pada model ini tidak ada yang bernilai > 0,80 sehingga tidak terjadi multikolinearitas dalam hal ini (Winarno, 2015). Pada model 1 nilai *d* yang menggambarkan Durbin-Watson (DW) berada diantara 1,54 dan 2,46 jadi dapat disimpulkan model ini bebas dari masalah autokorelasi. Sedangkan untuk model 2 dan 3 masih terjadi masalah autokorelasi. Kemudian, hasil pengujian heterokedastisitas untuk model regresi menunjukkan tidak ada masalah karena pada setiap variabel independen tidak ada yang signifikan ( $p > 0,05$ ) kecuali model 3. Tetapi hasil pengujian normalitas menunjukkan data tidak terdistribusi normal karena Jarque-Bera memiliki nilai  $p > 0,05$ .

Teorema Limit Pusat mengatakan jika sampel penelitian lebih dari 30 atau berukuran cukup besar, maka dapat dikatakan distribusi samplingnya mendekati distribusi normal (Nurudin *et al.*, 2014). Penelitian ini menggunakan 41 sampel dari populasi 45 perbankan yang terdapat di BEI selama tahun 2017-2019 atau sebesar 93,18 persen dari populasi. Didasari dengan Teorema Limit Pusat jumlah sampel pada penelitian ini tergolong besar sehingga dapat dikatakan terdistribusi normal. Lalu, penelitian Gujarati (2003) mengatakan bahwa pada *Random Effect Model* dengan metode *Generalized Least Square* (GLS) dapat mengatasi masalah autokorelasi yang sering muncul dalam rumus OLS. Maka dari itu, model regresi data panel menggunakan Random Effect Model yang sifatnya GLS dapat

mengabaikan masalah autokorelasi (Mulyasari, 2016). Sehingga, masalah autokorelasi dalam penelitian ini dapat teratasi dan dapat disimpulkan bahwa pengujian regresi tetap dapat dilakukan.

**Tabel 3.** Hasil Pengujian Regresi Data Panel

Persamaan Regresi	Chow Test (cross section chi-square)	Hausman Test (cross-section random)	Langrange Test (breusch-pagan,both)	Kesimpulan Model yang tepat
TS	220.28	4.01	59.34	Random Effect Model
TK	196.54	0.02	-	Fixed Effect Model
RK	169.52	1.09	48.36	Random Effect Model

Keterangan:

TS: Tingkat Simpanan; TK: Tingkat Kredit; RK: Risiko Kredit

Sumber: data yang diolah

Hasil penentuan model regresi data panel dengan *Chow Test*, *Hausman Test*, dan *Breusch-Pagan Langrange Multiplier (LM) Test* menunjukkan bahwa *Random Effect Model (RE)* teknik estimasi yang tepat untuk hipotesis 1 dan 3, sedangkan untuk hipotesis 2 menggunakan *Fixed Effect Model*. Hasil dari LM Test menunjukkan bahwa nilai  $p < 0,05$  maka hasil model regresinya menggunakan *Random Effect Model* untuk hipotesis 1 dan 3 (Winarno, 2015). Sedangkan hasil *Chow Test* dan *Hausman Test* dari hipotesis 2 adalah  $p < 0,05$  maka dari itu model regresinya menggunakan *Fixed Effect Model* (Winarno, 2015).

**Tabel 4.** Hasil Pengujian Hipotesis

Variabel	Tingkat Simpanan		Tingkat Kredit		Resiko Kredit	
	Koefisien regresi	Prob.	Koefisien regresi	Prob.	Koefisien regresi	Prob.
Konstanta	0,73	0,00	0,65	0,26	0,10	0,00
DKP	-0,00	0,31	-0,00	0,40	0,00	0,20
DDP	-0,01	0,20	0,08	0,02	-0,01	0,03
SIZE	-0,01	0,03	0,03	0,16	-0,00	0,00
LEV	0,47	0,00	-1,06	0,00	0,05	0,02
KM	-0,45	0,47	36,94	0,10	-1,31	0,10
R <sup>2</sup>	0,18		0,84		0,30	
Adjusted R <sup>2</sup>	0,15		0,74		0,18	
F-statistic	4,77	0,00	7,94	0,00	5,96	0,00

Keterangan: DKP: Dewan Komisaris terkoneksi Politik; DDP: Dewan Direksi terkoneksi Politik; SIZE: Ukuran perusahaan; LEV: *Leverage*; KM: Kepemilikan Manajerial Politik

Sumber: data yang diolah

Berdasarkan hasil pengujian di atas, pengaruh dewan terkoneksi politik (dewan komisaris dan direksi) terhadap tingkat simpanan mempunyai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,15 yang artinya seluruh variabel independen dapat menjelaskan proporsi varians dari tingkat simpanan sebanyak 0,15 dan sisanya (0,85) dijelaskan variabel lain di luar persamaan ini. Demikian juga untuk variabel dependen tingkat kredit dan variabel dependen risiko kredit yang masing-masing mempunyai *adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,74 dan 0,18. Seluruh variabel independen dapat menjelaskan proporsi varians dari tingkat kredit sebanyak 0,74 dan risiko kredit sebanyak 0,18, lalu sisanya (0,26 dan 0,82) dijelaskan oleh variabel lain diluar persamaan ini. Lebih lanjut, nilai *F statistic* untuk semua pengujian bersifat signifikan pada tingkat signifikansi 1 persen. Hal tersebut berarti secara simultan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara statistik fungsi regresi untuk

pengujian hipotesis dalam penelitian ini memenuhi *goodness of fit* model sehingga model penelitian ini layak digunakan untuk memprediksi kinerja perusahaan.

Hasil uji t untuk variabel independen tingkat simpanan menunjukkan arah negatif dan tingkat signifikansi  $> 0,05$ . Hal ini berarti bahwa dewan komisaris terkoneksi politik maupun dewan direksi terkoneksi politik tidak berpengaruh terhadap tingkat simpanan. Ada kemungkinan tidak berpengaruhnya variabel dependen terhadap tingkat simpanan karena jumlah dewan terkoneksi politik baik dewan komisaris dan dewan direksi memiliki rata-rata yang rendah. Dari 123 observasi dalam penelitian ini, terdapat 53 yang tidak memiliki dewan terkoneksi politik. Dari seluruh total dewan dalam perbankan hanya sebagian kecil yang memiliki koneksi politik dalam perbankan. Berkaitan dengan tugas dewan komisaris sebagai pengawas dan dewan direksi sebagai pengelola perusahaan, terdapat kemungkinan hanya sedikit dewan terkoneksi politik yang memiliki wewenang mengenai penerimaan tabungan dari nasabah sehingga dewan terkoneksi politik tidak memiliki peran yang berarti terhadap tingkat simpanan bank. Pihak eksekutif perusahaan yang terkoneksi politik, akan lebih mudah mendapatkan hak istimewa. Penelitian Boateng *et al.* (2019); Sutopo *et al.* (2017) juga berpendapat bahwa dewan terkoneksi politik cenderung mendapatkan tingkat bunga yang rendah, karena dianggap kurang berisiko. Tingkat bunga yang rendah tidak disukai oleh nasabah, karena yang diharapkan adalah bunga yang tinggi. Bunga rendah mengakibatkan tingkat simpanan menurun. Penelitian Supatmi *et al.* (2019) menemukan perusahaan terkoneksi politik memiliki kecukupan modal yang rendah dilihat dari rasio *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Temuan ini tidak mendukung teori agensi yang menyatakan bahwa dewan terkoneksi politik dalam perusahaan akan berdampak negatif terhadap kinerja perbankan, dalam hal ini merupakan penerimaan tabungan dari nasabah. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian Amalia & Muazaroh (2019); Boateng *et al.* (2019); Harsono & Kwok (2019); Sutopo *et al.* (2017) yang mengatakan bahwa perusahaan terkoneksi politik cenderung memiliki bunga simpanan yang lebih rendah dari bunga kredit, bunga simpanan yang rendah tidak menarik pada nasabah dan mengakibatkan turunnya tingkat simpanan. Dengan demikian, H1a dan H1b tidak terdukung.

Hasil uji t untuk dewan direksi terkoneksi politik terhadap tingkat kredit menunjukkan arah positif dan memiliki tingkat signifikansi  $< 0,05$  yang berarti dewan direksi terkoneksi politik berpengaruh positif terhadap tingkat kredit. Hal ini berarti dewan direksi terkoneksi politik memengaruhi banyaknya kredit yang bank salurkan kepada masyarakat. Dewan direksi terkoneksi politik berpengaruh positif terhadap kinerja perbankan, ini berarti banyaknya dewan direksi terkoneksi politik di bank akan meningkatkan kinerja perbankan, yaitu meningkatkan kredit yang disalurkan kepada masyarakat. Temuan ini tidak sejalan dengan teori agensi yang menyatakan bahwa dewan terkoneksi politik berdampak negatif bagi kinerja perbankan. Namun, temuan ini mendukung teori ketergantungan sumber daya *atau Resources Dependent Theory* yang dicetuskan oleh Pfeffer & Salancik, (1978) sebagaimana dikutip dari Hillman (2005). Teori ini menyatakan bahwa dewan terkoneksi politik membawa kebermanfaatan bagi perusahaan, salah satunya memperluas jaringan/akses komunikasi yang mampu mendorong tingkat kredit bank, dengan kemampuan dalam menyalurkan dana.

Sedangkan, hasil uji t untuk variabel independen tingkat kredit, dewan komisaris terkoneksi politik terhadap tingkat kredit menunjukkan arah negatif dan tingkat signifikansi  $> 0,05$ , artinya dewan komisaris terkoneksi politik tidak berpengaruh terhadap tingkat kredit. Pada umumnya tugas dewan komisaris adalah melakukan pengawasan tetapi porsi dewan komisaris terkoneksi politik jika dibandingkan dengan total dewan komisaris dalam perbankan sangatlah kecil, dari 123 observasi terdapat 49 observasi yang tidak memiliki dewan komisaris terkoneksi politik. Tidak semua bank memiliki dewan komisaris terkoneksi politik dan secara rata-rata jumlah dewan terkoneksi politik di perbankan juga rendah sehingga dewan komisaris terkoneksi politik tidak memiliki peran besar dalam pengambilan kebijakan penyaluran kredit. Hak suara yang dimiliki dewan komisaris terkoneksi politik juga menjadi rendah sehingga tidak berpengaruh terhadap tingkat kredit. Temuan ini tidak mendukung teori agensi yang menunjukkan dewan terkoneksi politik berdampak negatif terhadap kinerja bank. Disimpulkan bahwa H2a dan H2b tidak terdukung, karena H2b memiliki arah berlawanan dengan hipotesis. Kredit merupakan kesepakatan pinjam meminjam antara nasabah dan bank yang bersangkutan dengan menyediakan uang/tagihan. Bunga kredit cenderung lebih tinggi dari pada

bunga simpanan, dan termasuk sumber pendapatan utama bank (Bank Indonesia, 2019). Nasabah yang melakukan kredit dengan jumlah yang besar akan meningkatkan kinerja bank (Afriyeni, 2018). Penelitian Sutopo *et al.* (2017) mengatakan bahwa bunga pinjaman yang dikenakan pada perusahaan terkoneksi politik lebih tinggi. Bunga kredit yang tinggi tidak menarik bagi para nasabah, karena dana yang dikeluarkan nasabah berarti lebih besar sehingga dewan terkoneksi politik tidak meningkatkan tingkat kredit. Hal ini menyebabkan penurunan kinerja bank, karena adanya tingkat kredit yang semakin rendah. Penelitian Supatmi *et al.* (2019) membuktikan perusahaan yang memiliki koneksi politik memiliki pinjaman yang bermasalah dan rendahnya rasio *Loan to Deposit Rasio* (LDR). Penelitian ini memprediksi bahwa pengaruh dewan terkoneksi politik akan berpengaruh negatif terhadap tingkat kredit.

Selanjutnya, hasil uji t untuk dewan direksi terkoneksi politik pada hipotesis ketiga menunjukkan arah negatif dan tingkat signifikansi  $< 0,05$ , artinya dewan direksi terkoneksi politik berpengaruh negatif terhadap risiko kredit. Dengan kata lain, semakin banyak dewan direksi terkoneksi politik dalam bank tersebut, makin rendah risiko kredit yang bank hadapi. Penelitian ini membuktikan bahwa adanya dewan direksi terkoneksi politik tidak hanya membantu meningkatkan penyaluran kredit terhadap masyarakat tetapi membuat kredit yang bermutu, dilihat dengan rata-rata tingkat kredit macet yang rendah. Lebih lanjut, hal ini membantu perbankan untuk mengurangi risiko kredit dan berdampak baik terhadap kinerja bank. Temuan ini tidak mendukung teori agensi yang memandang koneksi politik diperusahaan akan membuat perusahaan semakin berisiko, melainkan sejalan dengan teori ketergantungan sumber daya. Teori ketergantungan sumber daya menunjukkan bahwa dewan yang terkoneksi politik berdampak positif bagi perusahaan (Hillman, 2005), dalam hal ini adalah kredit macet perbankan yang relatif rendah.

Sebaliknya, hasil uji t untuk variabel independen risiko kredit, dewan komisaris terkoneksi politik pada hipotesis ketiga menunjukkan arah positif dan tingkat signifikansi  $> 0,05$ . Hal ini menunjukkan dewan komisaris terkoneksi politik tidak berpengaruh pada risiko kredit. Di sisi lain dewan komisaris terkoneksi politik tidak berpengaruh terhadap risiko kredit. Berkaitan dengan tidak berpengaruhnya dewan komisaris terkoneksi politik terhadap tingkat kredit, terdapat kemungkinan dewan komisaris terkoneksi politik tidak memiliki peran besar dalam penyaluran kredit, terlebih lagi dalam tingkat kredit macet. NPL merupakan salah satu indikator kesehatan bank,  $NPL < 0,05$  dikatakan baik dan tidak memerlukan pengawasan ketat (Bank Indonesia, 2004; OJK, 2017). Pada penelitian ini rata-rata risiko kredit sebesar 0,02, maka dari itu dewan terkoneksi politik tidak memiliki peran besar dalam risiko kredit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, H3a dan H3b tidak terdukung, karena H3b memiliki arah berlawanan dengan hipotesis. Perusahaan yang terkoneksi politik dengan tata kelola perusahaan yang buruk cenderung dibebani dengan rasio kredit bermasalah (NPL). NPL ini muncul karena tingkat kredit yang tinggi dalam perbankan. Tingkat kredit yang semakin besar juga sejalan dengan risiko kredit macet yang semakin besar juga. Bank yang mengambil risiko tinggi akan membahayakan kesehatan keuangannya. Penelitian Khwaja & Mian (2005) membuktikan bahwa perusahaan terkoneksi politik memiliki risiko gagal bayar lebih tinggi 50% daripada perusahaan tidak terkoneksi politik. Dewan terkoneksi politik menyebabkan kenaikan tingkat kredit macet karena kredit yang disalurkan digunakan untuk mendanai proyek yang tidak menguntungkan (Boateng *et al.*, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini memprediksi bahwa dewan terkoneksi politik berpengaruh positif terhadap risiko kredit.

## Simpulan

Berdasarkan pengujian dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris terkoneksi politik tidak berpengaruh terhadap tingkat simpanan, tingkat kredit maupun tingkat risiko kredit perbankan. Sementara itu, dewan direksi terkoneksi politik ditemukan berpengaruh positif terhadap tingkat kredit dan berpengaruh negatif terhadap risiko kredit namun ditemukan tidak berpengaruh terhadap tingkat simpanan. Makin banyak dewan direksi perbankan yang terkoneksi politik, makin banyak kredit yang disalurkan perbankan ke masyarakat dan makin rendah risiko kredit bermasalahnya.

## Daftar Pustaka

- Afriyeni, H. Y. (2018). *Analisis Loan To Deposit Ratio Dan Non Performing Loan Pada Pt . Bank Pembangunan Daerah ( Bpd ) Sumatera Barat Cabang Utama Padang*. 1–13.
- Akbar, D. A. (2013). Analisis Pengaruh Ukuran Perusahaan, Kecukupan Modal, Kualitas Aktiva Produktif (KAP) Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2007-2011). *Jurnal Ilmiah STIE MDP*, 3(1), 66–82.
- Aluy, C. A., Tulung, J. E., & Tasik, H. H. (2017). Pengaruh Keberadaan Wanita dalam Manajemen Puncak dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan Perbankan (Studi Pada Bank BUMN dan Bank Swasta Nasional Devisa di Indonesia). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 5(2), 821–828.
- Amalia, G. V., & Muazaroh. (2019). *Pengaruh koneksi politik terhadap kinerja bank dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi pada perbankan di indonesia*.
- Andini Mulyasari. (2016). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia dan Angkatan Kerja terhadap Produk Domestik Regional Bruto Andini. *Edaj*, 1(1), 1–14.
- Astuti, R. Y. (2016). Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyaluran Pembiayaan dan Kredit pada Lembaga Keuangan Mikro (Studi Multi Situs pada BMT Hasanah Mlarak dan BRI Unit Mlarak, Ponorogo). *Al Tijarah*, 2(1), 119. <https://doi.org/10.21111/tijarah.v2i1.666>
- Bank Indonesia. (2004). Surat Edaran Bank Indonesia No 6/73/Intern DPNP tgl 24 Desember 2004. In *online* (Vol. 284, Issue 6).
- Bank Indonesia. (2019). Aturan Bank Indonesia. *Perbankan*, 1, 1–476. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Boateng, A., Liu, Y., & Brahma, S. (2019). Politically connected boards, ownership structure and credit risk: Evidence from Chinese commercial banks. *Research in International Business and Finance*, 47(336), 162–173. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2018.07.008>
- Faccio, M. (2006). Politically connected firms. *American Economic Review*, 96(1), 369–386. <https://doi.org/10.1257/000282806776157704>
- Fadillah, A. R. (2017). Analisis Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan Yang Terdaftar Di Lq45. *Jurnal Akuntansi*, 12(1), 37–52. <https://doi.org/ISSN 2685-9246>
- Gujarati. (2003). Dasar-dasar Ekonometrika. In *Manajemen Pelayanan Umum Di Indonesia* (Issue March).
- Habib, A., Muhammadi, A. H., & Jiang, H. (2017). Political Connections and Related Party Transactions: Evidence from Indonesia. *International Journal of Accounting*, 52(1), 45–63. <https://doi.org/10.1016/j.intacc.2017.01.004>
- Hair, Joseph F. , Black, Jr, William C. Babin, Barry J. & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate Data Analysis. Pearson New International Edition*, 816.
- Harsanto, R. U. (2020). Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Hukum Dalam Aspek Transparansi Terhadap Risiko Pada Layanan Priority Banking. *Veritas et Justitia*, 6(2), 370–398. <https://doi.org/10.25123/vej.3381>
- Harsono, B., & Kwok, C. (2019). Analisis Pengaruh Koneksi Militer terhadap Suku Bunga di Perusahaan-Perusahaan Indonesia. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 03(02), 63–79. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.37253/gfa.v3i2.672>

- Hartono, J. (2013). *Metode Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman* (6th ed.). BPFE.
- Hillman, A. J. (2005). Politicians on the board of directors: Do connections affect the bottom line? *Journal of Management*, 31(3), 464–481. <https://doi.org/10.1177/0149206304272187>
- Khwaja, A. I., & Mian, A. (2005). Do Lenders Favor Politically Connected. *The Quarterly Journal of Economics*, 120(4), 1371–1411.
- Ling, L., Zhou, X., Liang, Q., Song, P., & Zeng, H. (2016). Political connections, overinvestments and firm performance: Evidence from Chinese listed real estate firms. *Finance Research Letters*, 18, 328–333. <https://doi.org/10.1016/j.frl.2016.05.009>
- Nurudin, M., Mara, M. N., & Kusnandar, D. (2014). *Ukuran sampel dan distribusi sampling dari beberapa variabel random kontinu*. 03(1), 1–6.
- OJK. (2017). SPI Januari 2020. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- OJK. (2020). Lima Tahun Terakhir Kredit Macet Masih dalam Batas Aman. *Data Books*, April, 2020.
- Pfeffer, J., & Salancik, G. (1978). *The External Control of Organizations: A Resource Dependence Perspective*.
- Rahmadani, F. D., & Rahayu, S. M. (2017). *Pengaruh Good Corporate Governance (GCG), Profitabilitas dan Leverage Terhadap Nilai Perusahaan*. 52(1), 173–182.
- Sjofjan, L. (2015). Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Banking Principle) Dalam Pembiayaan Syariah Sebagai Upaya Menjaga Tingkat Kesehatan Bank Syariah. *Palar | Pakuan Law Review*, 1(2). <https://doi.org/10.33751/.v1i2.927>
- Supatmi. (2020). *Pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap kinerja perusahaan dengan koneksi politik sebagai pemoderasi*.
- Supatmi, Sutrisno, T., Saraswati, E., & Purnomosidhi, B. (2019). The effect of related party transactions on firm performance: The moderating role of political connection in Indonesian banking. *Business: Theory and Practice*, 20(2003), 81–92. <https://doi.org/10.3846/BTP.2019.08>
- Sutopo Trinugroho, I., Damayanti, S.M., B. (2017). *Politically connected banks: Some evidence*. 18(1), 83–94.
- Tee, C. M. (2018). Political connections and the cost of debt: Re-examining the evidence from Malaysia. *Journal of Multinational Financial Management*, 46, 51–62. <https://doi.org/10.1016/j.mulfin.2018.05.003>
- Winarno, W. W. (2015). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews* (4th ed.). UU STIM YKPN.
- Wulandari, T., & Raharja. (2013). Analisis Pengaruh Political Connection Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan. *Analisis Pengaruh Political Connection Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Perusahaan*, 2, 141–152.